

DINAMIKA GOVERNANCE

Jurnal Ilmu Administrasi Negara

p-ISSN : 2303-0089

e-ISSN : 2656-9949

Volume 11

Nomor 1

April 2021

OPTIMALISASI SEKTOR UNGGULAN KOTA SURABAYA DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Anggraeny Puspaningtyas

ABSTRACT

Covid-19 pandemic that struck Surabaya is increasing day by day. The problem that occurs in people's lives is that the increase in per capita income may not raise the real standard of living of the community. The purpose of this study is to analyze the development of the local economy in recovery after the Covid-19 pandemic. Research conducted using qualitative research methods with a descriptive approach. The scope of the research is the optimization of the leading sectors of Surabaya in economic recovery after the Covid-19 pandemic using the Blakely and Bradesaw (2003) approach, namely the development of economic bases, institutions, development of Human Resources, and technology development. Based on the results of research that has been obtained and is the development of the economic base of the Surabaya during the pandemic, it has implemented a locality-based economic growth that relies on the sector of providing accommodation and food. From an institutional perspective, the Surabaya Regional Apparatus Organization (OPD) has coordinated and collaborated to conduct various trainings for economic players. Broadly speaking, it has carried out some training and mentoring to UMKM, but there are still notes that need to be improved. The factor to be considered in the development of Human Resources in Surabaya is the constraints of the business network. With the pandemic that has hit, many networks that have been formed have suddenly experienced a reduction or even cutouts in the distribution of goods and services. In developing technology, the Surabaya City Government collaborates with the private sector in supporting UMKM players. Apart from the private sector, various parties such as researchers, research institutes, the business community and others are made to support government activities. The marketplace is one of the media driving the national economy in the global competitive era and during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Local Economic Development (LED), Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Angka korban akibat pandemi Covid-19 yang melanda Kota Surabaya semakin hari semakin bertambah. Permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat bahwa kenaikan pendapatan per kapita mungkin tidak menaikkan standar hidup riil masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan ekonomi lokal dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ruang lingkup penelitian adalah optimalisasi sektor unggulan Kota Surabaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan Blakely dan Bradesaw (2003) yaitu pengembangan basis ekonomi, kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh adalah pengembangan basis ekonomi Kota Surabaya pada masa pandemi sudah menerapkan pertumbuhan ekonomi berbasis lokalitas yang bertumpu pada sektor penyediaan akomodasi dan makan. Dari segi kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya sudah saling berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan berbagai pelatihan untuk pelaku ekonomi. secara garis besar sudah melaksanakan beberapa pelatihan dan pendampingan kepada UMKM, namun masih ada catatan yang perlu diperbaiki. Faktor yang diperhatikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Surabaya adalah kendala jaringan usaha. Dengan adanya pandemi yang melanda, banyak sekali jaringan yang sudah terbentuk, mendadak mengalami pengurangan bahkan pemutusan dalam distribusi barang dan jasa. Dalam pengembangan teknologi, Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mendukung pelaku UMKM. Selain pihak swasta, berbagai pihak seperti peneliti, lembaga penelitian, dunia usaha dan lainnya diupayakan mendukung kegiatan pemerintah. Marketplace merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional era kompetitif global dan di masa pandemi Covid-19.

Submitted : 10-02-2021
Revised : 11-04-2021
Inisiated Publish : 21-00-2021

AFFILIATION:
Program Studi Administrasi Negara
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Co-Responding E-mail:
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur
berkolaborasi dengan



Indonesia Association of Public
Administration Jawa Timur

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia memasuki tahun ke dua. Berbagai kebijakan pembatasan kegiatan di Indonesia sudah diterapkan dan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang jumlah pasien Covid-19 semakin hari semakin bertambah. Menurut data dari googleberita, per 14 Januari 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 858.043 orang dan yang meninggal 24.951. Sedangkan di Jawa Timur, kasus Covid-19 mencapai 95.064 orang dan yang meninggal sebanyak 6.647 orang (news.google.com). Dampak Covid-19 yang paling terasa adalah pada aktivitas perekonomian dimana kebutuhan sehari-hari masyarakat perlu dilakukan. Aktivitas ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan/atau jasa.

“Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan” (Sjafrizal, 2008). Perekonomian di Provinsi Jawa Timur dari awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2020 mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Pada situasi pandemi Covid-19, kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2020 jika dibandingkan Triwulan III Tahun 2019 terkontraksi 3,75% (BPS Jawa Timur, 2020). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,53%, diikuti jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 22,11% dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 2,96%, sedangkan komponen lainnya terkontraksi (BPS Jawa Timur, 2020). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 30,68%, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 21,34%. Dari sisi pengeluaranm pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 27,15%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,45%. Kondisi tersebut sangat berdampak pada Kota Surabaya sebagai Ibu Kota sekaligus pusat kegiatan dan perekonomian di Jawa Timur.

Faktor ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), modal usaha, teknologi, dan lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi dapat dilihat dari lembaga sosial, sikap masyarakat, kelembagaan politik, dan lainnya. Menurut Hariyoko & Puspaningtyas (2020), potensi ekonomi unggulan Kota Surabaya adalah “Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan Jasa Keuangan dan Asuransi”. Sedangkan untuk potensi ekonomi yang paling berdaya saing di Kota Surabaya yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Didukung dengan pendapat

Solow-Swan, “pertumbuhan ekonomi tergantung pada kesediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (technological progress)” (Arsyad, 2010).

Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral, “dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam” (Taringan 2012). Dari sektor unggulan Kota Surabaya, dapat diturunkan ke dalam berbagai sub-sektor yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor yang telah diturunkan menjadi sub-sektor yang bersifat homogen dan dapat diperinci menjadi atas dasar komoditi. Misalnya sub-sektor bahan makanan dapat diperinci menjadi komoditi sayuran, buah-buahan, beras, gandum, dan sebagainya. Kondisi pandemi yang melanda Kota Surabaya, membuat pemerintah beserta masyarakat mencari potensi dan peluang untuk menetapkan sektor apa yang dapat ditingkatkan serta lokasi kegiatan peningkatan tersebut. Pendekatan sektoral yang mengacu pertumbuhan beberapa sektor yang potensial melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta dan *stakeholders* lainnya. Hal ini ditujukan untuk memberikan rangsangan percepatan perkembangan antara satu sektor dengan sektor lainnya.

Sesuai dengan arahan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Lukmanul Hakim menjelaskan arahan Wakil Presiden RI yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM khususnya usaha mikro (antaranews.com). Kegiatan usaha kecil baik pada konsep tradisional atau modern harus digalakkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi karena UMKM merupakan salah satu sektor industri yang tidak terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro melalui pemberian hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana Lembaga Pengelola Dana Begulir (LPDB) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM.

Dalam rangka untuk mencapai kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dibutuhkan peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, *fintech*, *marketplace*, dan seluruh pelaku usaha agar dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Surabaya yang sangat berperan serta dalam meningkatkan dan mendorong UMKM lokal adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, dan

Dinas Perdagangan. Peran sumber daya dalam pengembangan ekonomi yang cukup signifikan, peneliti mengidentifikasi sumber daya tersebut dalam proses pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan Blakely dan Bradesaw (2003) yaitu:

1. *Material* (fisik), infrastruktur, bangunan, tanah, kawasan dan sumber daya alam;
2. *Man* (manusia), kemampuan individu, ketersediaan tenaga kerja, dan kapasitas pelatihan;
3. *Market* (pasar), kompetisi, analisis pasar dan strategi pemasaran;
4. *Management* (manajemen), struktur organisasi, lembaga, penelitian dan kajian, pemasaran, dan legalitas;
5. *Money* (anggaran), ketersediaan dana, akses modal, hutang dan subsidi.

Strategi pengembangan lokal yang sesuai dengan Kota Surabaya harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan ekonomi dapat didefinisikan sebagai “proses kenaikan pendapatan per kapita dalam suatu jangka waktu yang panjang” (Adisasmita, 2013). Permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat bahwa ada saat kenaikan pendapatan per kapita mungkin tidak menaikkan standar hidup riil masyarakat. Dapat pula terjadi pendapatan nyata per kapita meningkat tetapi konsumsi per kapita menurun, hal ini dimungkinkan masyarakat sedang berupaya meningkatkan tabungan atau pemerintah menghabiskan sebagian besar dari pendapatannya untuk kepentingan pertahanan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkan kajian optimalisasi sektor unggulan Kota Surabaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan ekonomi lokal dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19.

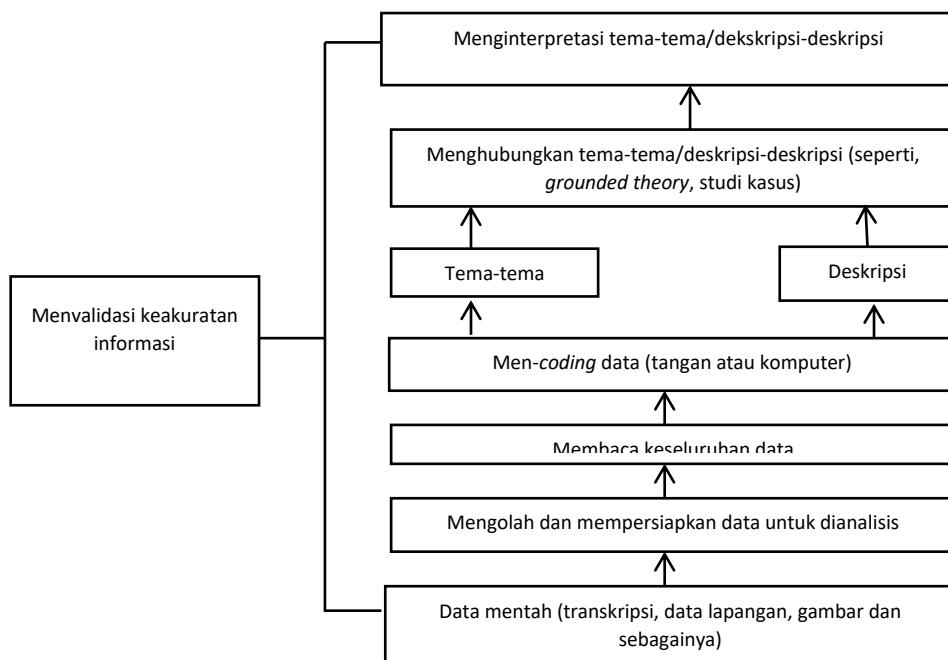
METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, ruang lingkup, fokus penelitian, tempat penelitian, informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ruang lingkup penelitian adalah optimalisasi sektor unggulan Kota Surabaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan basis ekonomi (lokalitas);
- b) Kelembagaan;
- c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- d) Pengembangan teknologi.

Fokus penelitian tersebut di atas mengacu pada konsep proses pengembangan ekonomi

lokal dengan pendekatan Blakely dan Bradesaw (2003). Namun, pendekatan *money* (anggaran) tidak menjadi fokus penelitian karena merupakan urusan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya dengan mengambil data dan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perdagangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan sembilan penelitian kualitatif Creswell (2014) yaitu:



Gambar 1. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2014)

Dengan menggunakan teknik analisis data dari Creswell, sekaligus menggunakan teknik analisis dengan menggunakan pendekatan Blakely dan Bradesaw (2003) yaitu konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pendekatan Blakely dan Bradesaw diantaranya a) Pengembangan basis ekonomi (lokalisasi); b) Kelembagaan; c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan d) Pengembangan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang berkolaborasi dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perdagangan. Ketiga organisasi tersebut didukung oleh *stakeholders* lain dalam menanggulangi permasalahan ekonomi di Kota Surabaya pasca pandemi. Dari hasil

penelitian yang diklasifikasikan ke dalam pendekatan Blakely dan Bradesaw yaitu Pengembangan basis ekonomi (lokalitas), Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan teknologi.

a. Pengembangan Basis Ekonomi

Perekonomian di Kota Surabaya masa pandemi mengalami penurunan seperti halnya perekonomian nasional dan dunia. Pada kuartal III tahun 2020, perekonomian Kota Surabaya mengalami pertumbuhan 5,89% dibandingkan kuartal II tahun 2020. Tetapi kondisi perekonomian Jawa Timur jika di bandingkan dengan Kuartal III tahun 2019 masih mengalami kontraksi 3,75% dan secara kumulatif Januari – September tahun 2020 masih mengalami kontraksi 2,29%. Salah satu sektor yang didorong untuk meningkatkan perekonomian di Kota Surabaya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam UU tersebut”. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Dalam pasal 6 UU Tahun 2008, nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha kecil dalam perekonomian produktif yang notabene adalah sebagai bentukan sendiri, baik yang dibentuk atas dasar individu maupun secara kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dalam usaha ini hanya dimiliki oleh perorangan dengan kekayaan bersih Rp 50.000.000,00 dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500.000.000,00;
3. Usaha menengah dalam perekonomian produktif bukan merupakan suatu cabang/anak perusahaan. Usaha ini adalah bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu usaha kecil atau besar dengan total kekayaan bersih mencapai Rp 500.000.000,00 hingga Rp 100.000.000,00 usaha ini tidak termasuk tanah ataupun bangunan.

Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor UMKM merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengatasi kondisi pasca pandemi. Pemerintah kota melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan dan Industri adalah memberikan pelatihan dengan cara pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan dan penguatan modal untuk menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan daya saing pada UMKM. Dinas tersebut juga menyusun petunjuk teknis guna memberikan fasilitas pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk yang meliputi pengembangan desain produk dan kemasan, pemasaran dan sumber daya manusia. Selain itu, Dinas Perdagangan Kota Surabaya memberikan fasilitas pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan lainnya.

Staf Pemasaran Dinas Perdagangan Kota Surabaya menyatakan penurunan pemasaran UMKM sangat terlihat pada sektor *fashion* dan *handycraft*. Banyak pelaku UMKM produk tersebut memilih beralih ke sektor makanan dan minuman. Peralihan tersebut sebagai bentuk adaptasi di tengah krisis karena tidak memungkinkan tetap bertahan di sektor kerajinan dan pakaian yang konsumennya menurun drastis. Selain beralih ke sektor makanan dan minuman, banyak pelaku UMKM beralih ke produksi baju hamzat dan masker karena melihat peluang permintaan yang melonjak. Dengan adanya pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya, pelaku UMKM lebih cepat dalam melakukan adaptasi.

Didorong dengan dukungan masyarakat Kota Surabaya dalam meningkatkan perekonomian melalui program pemerintah menjadikan pelaku UMKM tetap bertahan. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya memberdayakan pelaku UMKM, dengan mengajak berkolaborasi bersama Pemerintah Kota dalam upaya mengantisipasi dan menagani pandemi Covid-19. Upaya tersebut adalah memberikan bantuan modal dengan pembuatan masker, alat pelindung diri (APD) seperti baju hamzat dan *face shield*, produk olahan makanan yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19.

Tercatat di Kota Surabaya terdapat 165 UMKM yang memproduksi kering tempe, 10 UMKM yang memproduksi abon, 49 UMKM yang memproduksi sambal pecel, 11 UMKM yang memproduksi/membuat APD dan 41 UMKM yang memproduksi masker kain. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk pelaku UMKM yang tergabung dalam “Pahlawan Ekonomi” adalah pendaftaran Kartu Prakerja melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya. Ada 156 UMKM yang terdata dengan bantuan Pelaku Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan UKM yang nantinya akan dimonitoring oleh Dinas secara teknisnya. Monitoring yang dilakukan salah satunya adalah bagaimana

perkembangan omzet pelaku UMKM yang menerima bantuan tersebut.

Di bidang pariwisata, Pemerintah Kota Surabaya banyak melakukan berbagai kegiatan peresmian tempat / lokasi baru untuk tujuan destinasi wisata di kemudian hari. Sebagai contoh Plasa Surabaya, Alun-Alun Surabaya, Balai Pemuda yang digunakan untuk para pekerja seni melakukan pameran. Hal ini dikarenakan pekerja seni termasuk dalam data para pekerja yang terdampak Covid-19. Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan, pameran seni sempat berjalan dan terjadwal, namun karena minat masyarakat terlalu tinggi akibatnya membludak, akhirnya acara tersebut diberkentikan sementara waktu. Meski sudah sesuai dengan protokol kesehatan, namun Pemerintah Kota tidak berani mengambil resiko terlalu tinggi.

b. Kelembagaan

Membahas kelembagaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal di Kota Surabaya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan yang mengurusi bidang UMKM hanya menyentuh pada para pelaku usaha Mikro, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembinaan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Bidang yang melayani UMKM di Dinas Perdagangan hanya bidang pemasaran yang mana dalam hal ini hanya melakukan penjualan produk-produk dan pembinaan yang dilakukan hanya di pembinaan pemasaran bukan produksi.

Lokalitas yang terbentuk di Kota Surabaya mengikuti program pemerintah dengan konsep kampung unggulan yang diangkat dari konsep kementerian yaitu *one village one product*. Di Kota Surabaya, kampung yang memiliki produksi UMKM dengan produk yang sama, akan diangkat menjadi branding kampung sesuai dengan produksinya. Misalnya adalah kampung herbal, kampung batik, kampung tempe, dan sebagainya. Kampung tersebut diangkat dan dibentuk oleh Dinas Perindustrian dengan cara dua proses pembentukan. Proses terbentuknya lokalitas di setiap *cluster* adalah dengan cara alami dan pembentukan yang sudah ditetapkan oleh dinas.

Cluster yang terbentuk secara alami dalam memproduksi suatu produk di wilayah tertentu karena adanya unsur ikut-ikutan dan rasa ingin berkembang ketika melihat orang lain berhasil dalam memproduksi suatu produk. *Cluster* yang dibentuk dan ditetapkan oleh dinas misalnya dalam suatu kampung ada yang mengagas untuk membuat satu produk tertentu. Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan pemberdayaan melalui berbagai pelatihan bagi

para pelaku ekonomi. Sesuai dengan pernyataan Dinas Perdagangan, jika masyarakat ingin lebih maju usahanya, maka individu yang ada di *cluster* dianjurkan selalu mengikuti pelatihan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Tetapi selain adanya *cluster* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya, ada beberapa *cluster* yang dibentuk oleh beberapa industri/swasta sebagai mitra *corporate social responsibility* (CSR). Pihak swasta yang mendatangi kampung untuk melakukan pelatihan dan pemberdayaan untuk menciptakan atau memproduksi suatu produk yang cocok untuk dijadikan usaha masyarakat setempat. Kelembagaan yang terjadi di Kota Surabaya sudah baik dalam melakukan koordinasi program dan kegiatan untuk mengatasi perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Dinas Perdagangan dalam menaungi UMKM lebih mengarah pada menjaga kestabilan harga produk, dan pelayanan pengeluaran ijin serta pengawasan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi (baik institusi maupun perusahaan). Menurut McClelland dalam Wiratmo (2001) “jika seseorang memiliki karakteristik wirausaha dalam menjalankan usaha, maka keinginan atau dorongan dalam diri orang tersebut yang memotivasi perliaku ke arah pencapaian tujuan usaha”. Faktor yang diperhatikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Surabaya adalah kendala jaringan usaha. Dengan adanya pandemi yang melanda, banyak sekali jaringan yang sudah terbentuk, mendadak mengalami pengurangan bahkan pemutusan dalam distribusi barang dan jasa. Bagi pelaku usaha baru, lemahnya akses informasi pasar dan belum optimalnya produk UMKM yang dapat menjangkau konsumen.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kewenangan sebagai pembina dan fasilitator masyarakat Kota Surabaya untuk membuka sebuah usaha atau mengembangkan usahanya. Apabila ada masyarakat Kota Surabaya yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki dana untuk modal, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial akan memberikan bantuan berupa bahan-bahan untuk menunjang usaha tersebut, dan dinas terkait. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendorong adanya inovasi produk dan pemasaran bagi pelaku usaha. Salah satunya adalah pemasaran melalui media sosial dan *marketplace*.

d. Pengembangan Teknologi

Menurut teori Blakely & Bradshaw (2003), modal teknologi sangat penting untuk mendukung proses pengembangan ekonomi lokal. Semakin bermanfaat teknologi yang digunakan, semakin cepat pula pengembangan ekonomi lokal yang dicapai. Dalam pengembangan teknologi, Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mendukung pelaku UMKM. Selain pihak swasta, berbagai pihak seperti peneliti, lembaga penelitian, dunia usaha dan lainnya diupayakan mendukung kegiatan pemerintah. *Marketplace* sebagai media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan. Bagi *supplier*/penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa mereka. *Marketplace* merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional era kompetitif global dan di masa pandemi Covid-19.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perdagangan menganjurkan pelaku usaha memasarkan produknya menggunakan marketplace. Semakin gencar pemasaran *online*, semakin besar peluang usaha yang berkembang karena banyak orang sudah beralih menggunakan belanja *online* di masa pandemi. Kemudahan transaksi secara *online* kerap dipilih masyarakat dengan alasan efisien waktu. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan pelatihan yang menunjang pemasaran *online*. Pelatihan yang disediakan meliputi pasca produksi dengan pengambilan gambar (fotografi), editing dan memasukkan ke marketplace dengan penggunaan kata/kalimat pemasaran. Di masa pandemi ini, pelatihan dilakukan secara *online* dan *offline* (dengan peserta terbatas dan mematuhi protokol kesehatan).

Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ikut andil dalam membantu proses pengembangan Sistem Ecobis yang berisi berbagai program di perangkat daerah teknis bidang ekonomi. Program yang ada di dalam sistem Ecobis adalah UMKM yang akan dikembangkan seperti marketplace produk UMKM binaan pemerintah. Di dalam sistem Ecobis, dilengkapi pula informasi harga bahan pokok Kota Surabaya agar stabilitas harga terkontrol. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, ke depan akan dikembangkan informasi tempat wisata yang dibuka pada masa pandemi. sayangnya, Ecobis bukan aplikasi yang dapat diinstal di gadget, melainkan website yang ada di ICT Bappeko Surabaya. Adapun website tersebut dapat diakses di <https://bappeko.surabaya.go.id/ecobis/>.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dianalisis sesuai dengan teori Blakely & Bradshaw (2003), kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan basis ekonomi

Pengembangan basis ekonomi Kota Surabaya pada masa pandemi sudah menerapkan pertumbuhan ekonomi berbasis lokalitas yang bertumpu pada sektor penyediaan akomodasi dan makan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah melakukan pengembangan lokalitas Kota Surabaya dengan melakukan pembinaan pelaku usaha dan pelaku rintisan usaha. Pengembangan lokalitas dengan sistem *cluster* di beberapa wilayah belum dilengkapi dengan sentra produk khas Kota Surabaya.

2. Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya sudah saling berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan berbagai pelatihan untuk pelaku ekonomi. secara garis besar sudah melaksanakan beberapa pelatihan dan pendampingan kepada UMKM, namun masih ada catatan yang perlu diperbaiki. Peran serta kelembagaan tersebut masih belum sesuai dengan yang diinginkan, sebagai contoh dalam pengelolaan UMKM yang ada tersebut masih belum mampu untuk dikoordinir dengan baik. pengelolaan dapat dilakukan dengan membentuk koperasi atau lembaga lain yang mempunyai tujuan untuk menjaga kesinambungan usaha dari UMKM.

3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)

Faktor yang diperhatikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Surabaya adalah kendala jaringan usaha. Dengan adanya pandemi yang melanda, banyak sekali jaringan yang sudah terbentuk, mendadak mengalami pengurangan bahkan pemutusan dalam distribusi barang dan jasa. Bagi pelaku usaha baru, lemahnya akses informasi pasar dan belum optimalnya produk UMKM yang dapat menjangkau konsumen. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kewenangan sebagai pembina dan fasilitator masyarakat Kota Surabaya untuk membuka sebuah usaha atau mengembangkan usahanya.

4. Pengembangan Teknologi

Dalam pengembangan teknologi, Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mendukung pelaku UMKM. Selain pihak swasta, berbagai pihak seperti peneliti, lembaga penelitian, dunia usaha dan lainnya diupayakan mendukung kegiatan pemerintah. *Marketplace* sebagai media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan. Bagi *supplier/penjual* dapat

mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa mereka. *Marketplace* merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional era kompetitif global dan di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, Soedjono. 2002. Perencanaan Pembangunan di Indonesia (Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen serta Strategi). Surabaya: Airlangga University Press.
- Adisasmita, Raharjo. 2008. Ekonomi Archipelago. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. 2008. Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
- Blakely, Edward J, and Ted K. Bradshaw. 2003. Planning local economic Development (theory dan practice). Third edition. Vistaar Publication: New Delhi
- Cresswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmawan, Deni. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hafizrianda, Yundy, dan Arief Daryanto. 2010. Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Konsep dan Aplikasi). Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Hariyoko, Yusuf & Anggraeny Puspaningtyas. 2020. Perencanaan Pengembangan Sektor Unggulan Kota Surabaya. Publikasi Jurnal Ilmu Administrasi Publik PUBLISIA Vol 5 No 2 Tahun 2020
- Herbasuki, Nur Chasanah. 2018. Analysis of Community Participation in Tourism Village Development (Study of The Tingkir Lor Salatiga Village). Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 Tahun 2018
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi). Padang: Pranita Offset.
- Soleh, Chabib. 2014. Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Subagyo. 2020. Pemerintah Dorong UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 melalui <https://www.antaranews.com/berita/1660458/pemerintah-dorong-umkm-jadi-penggerak-ekonomi-rakyat-dalam-pen>.
- Taringan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Wiratmo, Masykur. 2001. Pengantar Kewirausahaan (Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.